BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Sistem pemerintahan parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana dalam sistem tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
   - kepala negara berkuasa secara simbolis dan tidak dapat dipersalahkan atas jalannya pemerintahan.
   - pemerintahan diselenggarakan oleh dewan menteri dengan perdana menteri sebagai pimpinannya, dan mereka bertanggungjawab kepada parlemen.
   - dimungkinkan adanya kerjasama dan hubungan yang dapat saling mempengaruhi antara pemegang pemegang kekuasaan yang ada.

2. Menurut hukum Islam, sistem pemerintahan parlementer tersebut dapat dibenarkan dan boleh diterapkan. Karena pada prinsipnya menurut hukum Islam seseorang hanya dituntut menurut apa yang telah diperbuatnya sendiri dan tidak dibebani ternadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala negara pada hakekatnya tidak melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional tugas-tugas pemerintahan tersebut di laksanakan oleh badan-badan yang ada yang diberi tugas untuk itu. Sehingga apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut maka layak kalau kepala negara tidak dapat dipersalahkan, karena kepala negara hanya berkuasa secara simbolis. Sedang kesalahan yang ada dibebankan pada badan atau person yang telah melaksanakan hal tersebut.

B. Saran-saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini kiranya ada beberapa saran dari penulis berkenaan dengan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Hendaknya karya ilmiah ini bisa dijadikan hipotesa dalam pembahasan masalah ketatanegaraan kususnya sistem pemerintahan parlementer, serta bisa dibuat acuan untuk pembahasan masalah-masalah terkait.
2. Bagi para remaja muslim kususnya, agar senantiasa berusaha menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran politik Islam, kususnya tentang sistem ketatanegaraan dalam Islam, dan kemungkinan untuk diasimilasikan dengan pemikiran-pemikiran politik ketatanegaraan yang ada sekarang. Karena mungkin dari sini masih banyak hal-hal yang belum dikaji secara mendalam dan diangkat sebagai kajian ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id